

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi perekonomian negara Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan serta perbaikan. Perkembangan perekonomian ini meliputi semua sektor baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Perekonomian yang berkembang saat ini tercermin dari perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat, dimana hal ini menciptakan persaingan antar perusahaan-perusahaan yang membuat perusahaan saling berlomba menunjukkan kinerja perusahaan yang terbaik satu sama lain. Terjadinya persaingan seperti ini, membuat adanya dinamika bisnis yang berubah-ubah. Dinamika bisnis yang berubah tersebut mengakibatkan banyak perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Namun, melihat perkembangan perekonomian saat ini menurun, kelesuan ekonomi global terjadi sebagaimana ditunjukkan oleh menurunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh Bank Dunia dan IMF. Akibat lesunya perekonomian global, para ahli mengakui bahwa kinerja perusahaan sekuritas yang menjadi Anggota Bursa mengalami penurunan (Samsul, 2013). Penurunan kinerja perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia ini seolah-olah mengkonfirmasi memburuknya data sektoral industri pada kuartal I 2013. Berdasarkan data keuangan yang dipublikasi, banyak perusahaan publik pada

kuartal I 2013 mengalami penurunan laba bersih yang signifikan dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sebab utama penurunan laba bersih ini karena penjualan turun menyusul daya konsumsi domestik yang lemah. Jumlah perusahaan yang mengalami penurunan laba bersih juga jauh lebih banyak (Zubi, 2013).

Menurut Dahlan Iskan (2013) “Harga komoditas pokok BUMN seperti perkebunan dan pertambangan mengalami penurunan di luar batas mempengaruhi kinerja” (www.republika.co.id). Pertumbuhan kinerja emiten pelat merah diprediksi akan sedikit melambat. Melemahnya harga komoditas dunia, ditambah dengan belum pulihnya kondisi makro ekonomi global, akan menjadi salah satu pemicu rendahnya pertumbuhan BUMN-BUMN pelat merah tahun 2014. Menurut Reza Priyambada (2014) “Emiten-emiten milik pemerintah masih memiliki ruang untuk tumbuh, namun bayang-bayang akan buruknya harga komoditas akan terus menghantui kinerja perseroan selama 12 bulan di tahun 2014, khusus nya untuk BUMN pelat merah yang bergerak di sektor energi” (<http://www.koran-jakarta.com>).

Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan BUMN itu sendiri. Penetapan Kinerja Kementerian BUMN disusun dengan berpedoman pada indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN revisi 2012 - 2014 sebagaimana ditetapkan dalam SK-161/MBU/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian BUMN Periode 2010 – 2014 (bumn.go.id).

Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan (Zarkasyi, 2008:48).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai jenis rasio yang digunakan, namun pada dasarnya kinerja keuangan perusahaan sering diukur dengan rasio profitabilitas, dimana kinerja keuangan diukur dengan membandingkan laba bersih perusahaan dari tahun ke tahun. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor, informasi mengenai kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka tetap di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kredibilitas yang baik (Mahsun, 2006:28).

Pengukuran kinerja bertujuan untuk membantu manajer menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*,

pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja organisasi. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu organisasi berfokus pada tujuan dan sasaran unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam pemberian pelayanan. *Kedua*, ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121).

Salah satu perusahaan BUMN yang mengalami penurunan kinerja keuangan saat ini adalah sektor industri pertambangan, dalam hal ini perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek adalah sektor yang sangat terpengaruh akibat krisis global saat ini. Penurunan kinerja keuangan di sektor pertambangan perusahaan BUMN pada tahun 2013 adalah penurunan harga komoditas membuat PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM) mengalami penurunan kinerja. Penilaian dalam kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan laba rugi. Ditemukan beberapa perusahaan BUMN yang mengalami penurunan laba. Laba perseroan tercatat turun 44,5% dari 627,78 miliar rupiah pada kuartal III-2012 menjadi 347,99 miliar rupiah pada kuartal III-2013. Terjadi hal serupa pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk (KAEF) mencatat penurunan laba 43,38% dari 21,19 triliun menjadi 1,24 triliun rupiah sepanjang sembilan bulan tahun 2013 (Koran-Jakarta.com/2014/02/17), dari data tersebut ternyata terjadi fenomena penurunan kinerja perusahaan BUMN di sektor pertambangan.

Penurunan kinerja pada perusahaan selalu berkaitan dengan konflik antar pemegang sahamnya. Terjadinya pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perusahaan, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan penuh curiga menimbulkan buruknya kinerja. Dengan demikian, keterbukaan adalah keharusan yang fundamental dan perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan bukan saja untuk menciptakan iklim kondusif bagi keuntungan perusahaan. Konflik perusahaan yang berlarut tentu berpotensi pada anjloknya kepercayaan publik dan menurunnya kinerja (Nasri, 2013).

Kinerja perusahaan yang menurun dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal perusahaan. Faktor tersebut antara lain komposisi kepemilikan aktiva, ukuran perusahaan, inflasi, harga komoditi, efisiensi dan efektivitas, penggunaan sumber daya perusahaan, kesempatan bertumbuh perusahaan, nilai tukar kurs rupiah maupun *good corporate governance* (Pandya, 2012). Masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum menerapkan prinsip-prinsip GCG secara berkesinambungan sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan. Terjadinya krisis keuangan tersebut penyebabnya adalah buruknya praktik *Corporate Governance* (CG). Kegagalan penerapan GCG menjadi salah satu pemicu krisis keuangan dalam 10 tahun terakhir. Perusahaan global pernah didenda ratusan juta dolar dari otoritas setempat karena buruknya penerapan GCG. Penelitian seputar *good corporate governance* menjadi penting untuk diteliti karena dampak yang ditimbulkan dari atau kurangnya penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) sangat luas (Muliaman, 2014). Saat ini BUMN menerapkan *corporate governance*

untuk meningkatkan kinerja, tetapi masih banyak ditemukan BUMN yang melanggar ketentuan *corporate governance* sehingga terkadang cara tersebut tidak efektif untuk meningkatkan kinerja. Seharusnya prinsip GCG sudah merupakan jaminan terselenggaranya kinerja BUMN yang lebih baik (Subiyanto, 2007).

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) sudah merupakan hal penting yang perlu diterapkan di Indonesia, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola dana publik seperti perusahaan yang terdaftar di bursa efek, perusahaan perbankan, dan perusahaan BUMN. Penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik sehingga dapat membantu perekonomian secara makro. Di Indonesia sendiri GCG masih tergolong lemah. Fenomena yang terjadi pada kebanyakan perusahaan di Indonesia adalah belum mampu melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional (Zakarsyi, 2008:4). Kajian lain juga menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara (Sutedi, 2011:11) bahkan menurut hasil survey ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) pada 11 negara terhadap pelaku bisnis asing di Asia tahun 2012 menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk di bidang *corporate governance*.

Corporate Governance merupakan topik yang menarik sejak dekade terakhir. Perusahaan *go public* membutuhkan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tepat

waktu. Perusahaan *go public* diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangannya untuk selalu berada dalam kondisi yang efektif dan efisien serta menghasilkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena wajib mengimplementasikan GCG (*good corporate governance*) (Muslimin, 2015) (www.republika.co.id).

Good Corporate Governance (GCG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Report* pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh *Sir Adrian Cadbury*, *Good Corporate Governance* (GCG) yang didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu para pemegang saham, direksi, kreditur, pemerintah, dan para *stakeholders* lainnya, termasuk para karyawan perusahaan. *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan secara kualitatif sehingga perusahaan mempunyai nilai tambah yang baik kepada dirinya sendiri maupun kepada lingkungannya (Media Akuntansi, 2000).

Masuknya konsep *Good Corporate Governance* ke Indonesia didorong oleh Lembaga Keuangan Internasional IMF (*International Monetary Fund*) suatu lembaga bentukan PBB yang bertujuan untuk membantu sistem moneter negara-negara yang mengalami masalah. IMF ini mensyaratkan bahwa untuk dapat memperoleh bantuan moneter dari IMF, maka Indonesia harus menerapkan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya bagi bank-bank dan perusahaan-perusahaan *go-public*. *Good Corporate Governance* yang dimaksudkan oleh penulis adalah penerapan prinsip *Good Corporate*

Governance pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

Pedoman penerapan *Good Corporate Governance* sendiri di Indonesia baru dikeluarkan tahun 1999 oleh komite nasional kebijakan *Governance* (KNKG). Perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya yang akan melakukan penjualan sahamnya di pasar modal wajib untuk menerapkan *Good Corporate Governance*, demikian pula dengan bank-bank yang beroperasi di Indonesia. Sementara itu pada sektor publik pemerintah juga menyadari pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*. Ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Ini dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN nomor : 23/M/PM.PBUMN/2000 yang mengatur dan merumuskan pengembangan praktik *Good Corporate Governance* dalam perusahaan perseroan yang dalam hal ini BUMN. Kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN di Indonesia ini dianggap penting karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan BUMN telah memberikan andil yang tidak kecil, baik dalam menopang keuangan negara maupun dalam melayani peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. *Good Corporate Governance* diperlukan BUMN untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

Menindak lanjuti komitmen pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan , misalnya keputusan Menteri

BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN, dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* serta berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika. Ditentukan bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasional. Ini berarti khusus BUMN merupakan kewajiban dan BUMN dijadikan contoh dalam penerapan GCG di Indonesia (Sutedi, 2011:90).

Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan membutuhkan pihak atau kelompok untuk memonitor implementasi kebijakan direksi, oleh karena itu dewan komisaris merupakan bagian pokok dari mekanisme *corporate governance*. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Pandya, 2012). Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal ini memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan

keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (Sutedi, 2011:93).

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) tersebut merupakan cerminan bagi perekonomian suatu negara. Namun yang terjadi di Indonesia rendahnya *corporate governance*, hubungan investor yang lemah, kurangnya tingkat transparansi, ketidak efisienan dalam laporan keuangan, dan masih kurangnya penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan beberapa perusahaan di Indonesia runtuh sehingga berpotensi memicu terjadinya krisis keuangan yang menyebabkan publik kurang percaya terhadap keandalan pelaporan keuangan perusahaan dan menyebabkan timbulnya krisis kepercayaan. Dengan diterapkannya *good corporate governance*, diharapkan akan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan mampu mengangkat kinerja perusahaan (Muliaman, 2014).

Penerapan *Good Corporate Governance* pada kenyataannya tidaklah mudah. *Good Corporate Governance* yang secara teoritis dikatakan akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga terbebas dari masalah kinerja keuangan yang mungkin akan timbul. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dampak penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penulis tertarik untuk meneliti pengaruh penerapan *Corporate Governance* tersebut pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

Dari berbagai uraian tersebut, terdapat beragam hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti sehingga mendorong peneliti untuk menelitinya lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini mengambil judul,

“Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).
- 2 Bagaimana kinerja keuangan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).
- 3 Seberapa besar pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap keuangan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan maksud penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Good Corporate Governance* pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan ilmu ekonomi khususnya *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang aplikasi ilmu teori pada perkuliahan dengan penerapan

materi yang sebenarnya. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi pihak perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan khususnya sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi investor dan para pelaku pasar modal dalam melakukan seleksi perusahaan dan pengambilan keputusan berinvestasi.

d. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi, khususnya mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.